

PEMBELAJARAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KAPASITAS
STAKEHOLDER DAN ORNOP DAERAH DALAM MENANGGAPI
SISTEM VERIFIKASI SAHNYA KAYU (SVSK)



Disiapkan oleh
DR. Agus Setyarso



MULTISTAKEHOLDER
FORESTRY
PROGRAMME

DFID

Department for
International
Development



KEHATI



PENGANTAR

Tulisan ini mengungkapkan informasi dan pengetahuan yang dicermati selama penulis mengikuti beberapa lokaltah dengan tema sistem verifikasi legalitas kayu. Dengan tulisan ini diharapkan dapat ditera kondisi awal dan potensi kapasitas yang diharapkan jika lokaltah tersebut diteruskan dengan beberapa komitmen tindak lanjut.

Peningkatan kapasitas para pihak lokal sangat berperan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem sertifikasi hutan pada umumnya, dan verifikasi legalitas kayu pada khususnya. Salah satu manfaat yang diharapkan secara lebih spesifik adalah peningkatan kapasitas stakeholder lokal di dalam memainkan fungsi monitoring independen terhadap verifikasi kinerja pengelolaan maupun terhadap penyelenggaraan SVSK di tingkat akar rumput.





1. Pendahuluan

Meskipun definisi mengenali legalitas kayu, standar legalitas yang berisi prinsip, kriteria dan indikator, dan sistem verifikasi legalitas kayu (SVSK atau SVLK) telah diproses melalui forum multipihak dan berlangsung bertahun-tahun, belum berarti bahwa di dalam penyelenggaraannya semua yang ada di dalam anatomi sistem tersebut telah dikuasai oleh para pemangku kepentingan di tingkat lokal. MFPII-DFID-Kehati mendorong lembaga *community foundations* yang ada di daerah untuk menyelenggarakan lokakarya atau lokalatih yang berkenaan dengan sistem verifikasi legalitas kayu di berbagai daerah terutama Sulawesi dan Nusa Tenggara. Para pihak dengan bantuan pendanaan dari OCSP telah pula melakukan lokalatih di Medan, yang menghadirkan peserta dari Sumatra Utara dan NAD. Di samping itu, melalui dana DFID, LEI telah memprakarsai sosialisasi SVSK di empat region, yakni Kalimantan di Samarinda, Jawa di Yogyakarta, Papua di Jayapura, dan Sumatra di Jambi.

Dari setiap penyelenggaraan sosialisasi dan lokalatih telah dilakukan pencermatan atas apa yang terjadi selama proses berlangsung. Pencermatan dilakukan terhadap kerangka acuan atau kurikulum lokalatih, terhadap ragam peserta, terhadap harapan peserta sebelum memasuki ruang lokalatih, terhadap pendekatan dan dialektika selama lokalatih, dan harapan tentang tindak lanjut setelah peserta menjalani lokalatih.

Agregasi pencermatan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, baik bagi individu maupun lembaga yang terlibat di dalam program peningkatan kapasitas SVSK. Pada konteks ini pemahaman diartikan sebagai penambahan informasi pada keluarga pengetahuan di dalam sistem ingatan, dan pembelajaran mengacu pada pemahaman yang diikuti dengan tindak psikomotorik untuk mengambil keputusan atau tidak mengambil keputusan terhadap program SVSK.





Di masa yang akan datang diperlukan lebih banyak agenda serupa yang diselenggarakan di berbagai tempat yang lain. Tentu, di masa yang akan datang tersebut penyelenggaraan lokalatih harus lebih dapat diukur efektivitasnya di dalam membangun kapasitas para pihak di tingkat lokal dalam ikut serta berperan pada implementasi sistem sertifikasi hutan atau secara khusus pelaksanaan verifikasi legalitas kayu.

Secara lebih spesifik, melalui pembelajaran ini ke depannya diharapkan terjadi pengambilan keputusan untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan pengembangan kapasitas sehingga para aktor lokal mampu dengan benar memahami sistem penilaian/sertifikasi/verifikasi, mampu memahami proses/prosedur penyelenggaraan sistem penilaian/ sertifikasi/verifikasi, mampu melakukan pembelajaran terhadap sistem dan proses penyelenggaraannya, dan mampu menetapkan tindak koreksi terhadap proses dan sistem tersebut.

2. Ragam peserta sosialisasi dan loka latih

• Latar belakang peserta

Di Sulawesi, peserta berasal dari berbagai konstituen atau lembaga yang mencakup lembaga pemerintahan daerah (terutama Dinas yang mengurus kehutanan), Ornop (terutama yang mengurus kehutanan masyarakat dan konservasi), Perguruan Tinggi (dari program studi yang menyangkut kehutanan) dan penegak hukum (Polhut, Polisi, Jaksa), wakil masyarakat, dan pelaku usaha kehutanan. Di Sumatra Utara, seluruh peserta datang dari organisasi non-pemerintah yang terutama bergiat pada isu kehutanan masyarakat atau konservasi.

Latar belakang pendidikan sangat beragam. Meskipun di Sumatra utara ada keseragaman lembaga, tetap saja terdapat keberagaman latar belakang pendidikan. Ini menimbulkan potensi keberagaman kapasitas penyerapan informasi dan pengetahuan selama lokalatih.

Keberagaman muncul juga pada sosialisasi SVLK/SVSK yang dilakukan melalui fasilitasi LEI di empat region. Para peserta ditunjuk oleh instansi/ lembaga masing-masing, dan seringkali terjadi situasi dimana pemilihan individu peserta melulu berdasar ketersediaan waktu untuk mengikuti acara yang diundangkan. Pendelegasian kepada peserta tanpa prasyarat yang jelas telah menimbulkan permasalahan pada pelaksanaan dan dampak sosialisasi dan lokalatih.





Untuk kepentingan diseminasi, maka pemilihan peserta menjadi penting. Idealnya adalah peserta dipilih berbasis kombinasi dari dua karakter sebagai berikut:

- Peserta dipilih dari individu yang secara administrasi-birokrasi menempati jabatan yang memungkinkan yang bersangkutan menyebarkan informasi dan pengetahuan yang diperoleh selama lokatitih
- Peserta dipilih dari individu yang mempunyai kapasitas kepemimpinan, yang mampu mencari terobosan individual untuk penyebar-luasan informasi dan pengetahuan yang diperoleh selama lokatitih kepada konstituen potensialnya.

- **Tingkat pemahaman awal mengenai sertifikasi dan verifikasi**

Ketika datang di ruang lokatitih, para peserta membawa serta pengetahuan dan keterampilan individual yang beragam: baik yang menyangkut kehutanan, pengelolaan hutan, maupun legalitas operasi kehutanan. Ini menyebabkan kesulitan tersendiri, apalagi ketika jumlah peserta cukup banyak, lebih dari 20 orang. Banyak istilah teknis kehutanan yang harus diterangkan terlebih dahulu sebelum peserta mampu memahami materi yang disiapkan. Hampir tidak ada peserta yang mampu memahami keseluruhan operasi/kegiatan yang dilakukan oleh suatu IUPHHK, sejak dari permohonan ijin sampai dengan tahap pemrosesan kayu pada industri pengolahan kayu hulu. Untuk kegiatan monitoring, pemahaman terhadap kinerja sistem menjadi sangat penting, untuk tidak terjadi salah sasaran.

Menyangkut pemahaman mengenai sertifikasi hutan atau verifikasi legalitas kayu, pada umumnya rendah. Para peserta lebih banyak membawa pengetahuan mengenai *illegal logging* dan penegakan hukum yang lebih sering ditemui di kehidupan kerja sehari-hari. Pemahaman mengenai konteks internasional dan kepentingan nasional dalam sertifikasi hutan maupun verifikasi legalitas kayu merupakan hal yang baru bagi sebagian besar peserta. Lihat Tabel 1 sebagai ilustrasi. Tabel 1 ini dibuat melalui pengamatan informal di Sulawesi dan divalidasi melalui pengamatan formal/tertulis di Sumatera Utara.





Tabel 1. Pemahaman awal konteks verifikasi legalitas kayu terhadap berbagai situasi dan relasional kerja lembaga peserta

Isu	Asesmen (persen)	Keterangan
Kemampuan merefleksi posisi lembaga peserta di dalam konteks legalitas kayu di forum internasional	0 - 10	
Kemampuan merefleksi posisi lembaga peserta di dalam konteks legalitas kayu di tingkat nasional	0 - 15	
Kemampuan merefleksi posisi lembaga peserta di dalam konteks legalitas kayu di tingkat lokal	10 - 20	
Kemampuan merefleksi <u>posisi relational</u> lembaga peserta di dalam konteks legalitas kayu dengan <u>unit usaha kehutanan</u>	10 - 30	Angka yang besar (30%) ditunjukkan oleh peserta yang berasal dari Dishut
Kemampuan merefleksi <u>posisi relasional</u> lembaga peserta di dalam konteks legalitas kayu dengan <u>pemerintah daerah</u>	10 - 40	Angka yang besar (40%) ditunjukkan oleh peserta yang berasal dari Dishut
Kemampuan merefleksi <u>posisi relasional</u> lembaga peserta di dalam konteks legalitas kayu dengan <u>aparatus penegak hukum</u>	10 - 40	Angka yang besar (40%) ditunjukkan oleh peserta yang berasal dari Dishut

- **Harapan awal**

Seperti apakah harapan awal para peserta ketika pertama kali masuk di dalam ruang lokatitih? Sebagian besar peserta tidak membaca kerangka acuan lokatitih, sehingga tidak sempat menyesuaikan harapan individu dengan tujuan yang dirancang di dalam lokatitih. Berbagai harapan yang sempat tercatat adalah:





- i. forum lokalatih dapat menambah pengetahuan dan kesempatan meningkatkan keterampilan dalam penanggulangan *illegal logging*
- ii. forum lokalatih dapat membuka kesempatan baru untuk mengendalikan operasi pengelolaan hutan
- iii. forum lokalatih dapat dijadikan salah satu media untuk melakukan kampanye dan advokasi untuk tujuan tertentu dari lembaga peserta
- iv. forum lokalatih dapat dijadikan sarana memperluas jaringan kerja
- v. forum lokalatih dapat membuka peluang untuk ikut serta di dalam proyek pemerintah pusat

Disimak dari daftar harapan di atas, tentu tema sertifikasi hutan atau verifikasi legalitas kayu menjadi sosok asing pada khasanah pengetahuan awal. Pernyataan ini penting dan mendasar bagi penyusunan metoda dan kurikulum lokalatih berikutnya.

- i. Belum pernah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi
- ii. Semangat dan motivasi tinggi
- iii. Jujur dalam menyampaikan pendapat

3. Kurikulum atau kerangka acuan lokalatih

Kerangka acuan sosialisasi SVLK/SVSK yang diselenggarakan LEI bertitik berat pada penyampaian tugas pokok dan fungsi pada Departemen Kehutanan, Pemerintah Daerah, Instansi Penegak Hukum, didalam kaitannya dengan legalitas kayu, kemudian diteruskan dengan klarifikasi dan diskusi kelompok. Diskusi kelompok dibagi sesuai dengan kondisi peserta dan tema sentral yang melekat pada sosialisasi. Di dalam diskusi kelompok, agenda dimulai dengan *brainstorming*, penempatan isu-isu pada daftar isu, dan kemudian aspirasi peserta terhadap isu-isu yang berkembang.

Kerangka acuan yang dikemas untuk Sulawesi bertemakan diseminasi, sedangkan untuk di Sumatra Utara bertemakan Lokalatih. Di Sulawesi, meskipun di bawah judul diseminasi, isi agendanya cukup berat. Muatan agenda adalah sebagai berikut:





- **Muatan paparan**

- Paparan mengenai berbagai isu bidang kehutanan (tata niaga kayu) yang melatar belakangi TLAS dan isu perdagangan kayu internasional(1 jam)Instrumen kebijakan legalitas kayu di Indonesia, diikuti dengan diskusi
- Kebutuhan untuk mengembangkan sistem verifikasi legalitas kayu, diikuti dengan diskusi umum
- Hubungan TLAS/SVLK/SVSK dengan Pemberantasan *Illegal Logging* dan sertifikasi hasil hutan
- Hubungan TLAS dengan CBFM (*Community Base Forest Management*)
- Pengantar tentang verifikasi, Pengenalan berbagai macam Verifikasi
- Prinsip, kriteria, dan indikator untuk standar verifikasi legalitas kayu dari hutan negara berbasis UM, hutan negara tidak berbasis UM, hutan hak dan areal non hutan
- Prinsip, kriteria, dan indikator untuk standar verifikasi legalitas kayu untuk pengangkutan, pengolahan, perdagangan, dan pemindahtanganan
- Rancangan tata hubungan kerja dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
- Rancangan tahapan implementasi verifikasi legalitas kayu.

- **Muatan Diskusi kelompok**

- Hambatan / masalah penerapan TLAS di daerah dan alternatif solusinya.
- *Multistakeholder* / parapihak yang berkaitan langsung dan tidak langsung terhadap implementasi TLAS di daerah.
- Rencana indikatif pelaksanaan Desiminasi di 6 propinsi dan Strategi implelementasi TLAS di daerah.





Di Tomohon, Sulawesi Utara, agenda lokalatih mengandung muatan diseminasi, dengan seluruhnya menghadirkan panel narasumber dengan tema sebagai berikut:

- Instrumen Kebijakan Legalitas Kayu di Indonesia dan Kebutuhan untuk mengembangkan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK)
- Hubungan SVLK dengan pemberantasan *Illegal logging* dan sertifikasi hasil hutan.
- Pemberantasan *Illegal Logging* di Sulawesi (Kebijakan, Hambatan dan Masalahnya)
- Prinsip, kriteria, dan indikator untuk standar verifikasi legalitas kayu dari hutan negara berbasis UM (*unit management*), hutan Negara tidak berbasis UM (*unit management*), hutan hak dan areal non hutan hak
- Prinsip, kriteria, dan indikator untuk standar verifikasi legalitas kayu untuk pengangkutan, pengolahan, perdagangan dan pemindah tangan
- Rancangan tata hubungan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu dan tahapan implementasi verifikasi legalitas kayu.
- Peran civil society dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
- Hambatan, Masalah dan Strategi Implementasi SVLK di Daerah.





Lokalatih di **Brastagi, Sumut**, kurikulum setara dengan 40 jam dikemas dengan agenda sebagai berikut:

- Paparan dan diskusi mengenai peranan NGO dan masyarakat dalam mendorong perbaikan kinerja pengelolaan hutan di Indonesia
- Pengantar dan fasilitasi pendalaman peserta menyangkut Pemahaman monitoring hutan dan ketentuan/persyaratan perijinan perusahaan hutan
- Pengantar dan fasilitasi pendalaman peserta Pemahaman sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan lacak balak
- Pengantar dan fasilitasi pendalaman peserta Pemahaman penilaian kinerja oleh LPI
- Pengantar dan fasilitasi pendalaman peserta Pemahaman verifikasi legalitas/sahnya kayu
- Review dan pendalaman indikator dan kriteria (paralel atau masing-masing aspek selama 2 jam):
 - Monitoring indikator aspek prasyarat & produksi
 - Monitoring indikator aspek lingkungan
 - Monitoring indikator aspek sosial
- Pengantar studi kasus
- Simulasi studi kasus
- Presentasi informasi/temuan lapangan oleh peserta (pengayaan simulasi)
- Presentasi hasil simulasi oleh peserta
- Rencana tindak lanjut monitoring (rencana investigasi) oleh peserta.

Pembelajaran pada aspek kurikulum

- a. Konteks pelatihan belum begitu koheren antara misi konservasi dengan misi pemantauan kinerja PHL
- b. Kurikulum masih coba-coba, semua kurikulum disusun berbasis inisiatif dan pengalaman individu serta konsultasi. Perumusan kurikulum tidak berbasis pada kerangka pengembangan kurikulum tertentu
- c. Materi tidak disiapkan jauh hari sebelumnya sehingga tidak dapat dibagi pada peserta sebelum pelatihan
- D. Meskipun dilakukan pertemuan awal sehari atau malam sebelumnya di antara pelaksana dengan pemateri/nara sumber, tetapi tidak menyangkut pengembangan kerangka kurikulum menurut kerangka pendekatan sosialisasi ataupun lokalatih nasional, regional, dan lokal
- e. Banyak yang mengeluh soal waktu yang disediakan untuk interaksi peserta di dalam sosialisasi/pelatihan yang terbatas/pendek.





4. Pembelajaran selama lokalatih berlangsung

- **Kapasitas fasilitator/narasumber**
 - Fasilitator mempunyai beragam latar belakang baik pengetahuan, keterampilan dan sikap di dalam menjalankan pelayanan sosialisasi maupun pelatihan.
 - Fasilitator juga mempunyai beragam pengalaman yang sebagian besar tidak didasarkan atas standar kompetensi sebagai fasilitator yang secara spesifik menyangkut sosialisasi dan lokalatih mengenai standar kinerja pengelolaan hutan dan sertifikasi kehutanan.
 - Di antara fasilitator, peta kompetensi dan pengalaman fasilitasi/pengajaran belum dilakukan yang mengakibatkan *teamworking* tidak dapat dirancang dengan baik.
 - Fasilitator menyiapkan materi atau modul sosialisasi/lokalatih secara individual dan independen, yang menyebabkan beberapa *overlapping* materi belum sempat diharmonisasikan.
 - Skema pembelajaran dan pendalaman untuk tujuan sosialisasi maupun lebih spesifik untuk tujuan lokalatih belum banyak disinkronkan.
- **Kemampuan peserta merefleksikan pemahaman**
 - Pemahaman peserta dalam hal *illegal logging* berjalan cukup baik, tetapi pemahaman terhadap sertifikasi hutan atau verifikasi legalitas kayu masih belum dapat direfleksikan selama sosialisasi, dan sedikit refleksi muncul di dalam lokalatih.
 - Konteks sertifikasi dan verifikasi kehutanan pada tataran hubungan internasional belum banyak dapat direfleksikan selama sosialisasi dan lokalatih. Peserta lebih banyak menerima pemahaman sebagai suatu informasi yang baru sehingga relatif pasif di dalam diskusi menyangkut konteks internasional ini.
 - Sebagian peserta merefleksikan SVLK/SVSK sebagai proyek dari pemerintah pusat, sehingga keterlibatan mereka tidak banyak berbasis pada kebutuhan local untuk menerapkan system verifikasi tersebut. Situasi ini cukup serius jika dihadapkan pada kebutuhan meningkatkan kinerja tata-keperintahan bidang kehutanan (*good forestry governance*) di daerah.
 - Refleksi mengenai SVSK banyak ditarik keluar ketika disampaikan dampak dari berbagai perjanjian internasional (*Due diligent* dari EU, *Green Konjuho* dari Jepang, dan *Lacey Act* dari Amerika) terhadap usaha kehutanan di Indonesia.
 - Sejauh yang menyangkut SVLK/SVSK, beberapa pencermatan yang umum dapat direfleksikan baik di





- tingkat sosialisasi maupun lokalatih, yaitu:
- Bagaimana proses penyusunan dan implementasi SVLK/SVSK dapat dipertahankan transparansinya
 - Bagaimana penggiat di LSM dan masyarakat dapat terlibat di dalam operasional penerapan SVLK/SVSK, terutama di tingkat propinsi dan kabupaten
 - Bagaimana para pihak di propinsi dan kabupaten dapat menempati peran di dalam setiap unit kelembagaan SVLK/SVSK, misalnya di dalam struktur lembaga penilai, lembaga penyelesaian keberatan, dan lembaga pemantau
 - Bagaimana SVSK/SVLK menjamin untuk tidak menjadi beban birokrasi baru bagi pelaku usaha kehutanan.

- Pada lokalatih di Sumatra Utara yang berlangsung 40 jam, para peserta sudah mampu merefleksikan *logical flow* sebagai basis kompetensi sertifikasi hutan, yang berurutan dari indikator, *verifier* sampai dengan penetapan instrumentasi dan bobot penilaian
- Paling kurang peserta sudah mampu memahami tahapan asesmen/ penilaian/audit hutan, dan menyadari bahwa kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan
- Para peserta lokalatih masih memerlukan tindak lanjut pelatihan untuk meningkatkan *skill*, dan untuk kasus Sumatra Utara ditunjukkan oleh komitmen untuk merencanakan kegiatan tindak lanjut.

- **Kemampuan membangkitkan ide baru berbasis pengalaman sosialisasi dan lokalatih**

Tidak satupun para pihak yang diundang di dalam sosialisasi SVLK/SVSK yang diselenggarakan oleh LEI maupun *Community foundation* di Sulawesi (SCF) yang mampu menginisiasi ide baru atau ide lanjutan dari refleksi agenda sosialisasi. Di tingkat nasional, kelompok bisnis kehutanan menindaklanjuti sosialisasi dengan melakukan beberapa pertemuan dan kemudian menyusun kertas posisi. Tetapi hal seperti ini tidak terjadi di tingkat regional. Pada umumnya para peserta sosialisasi menjadikan bekal pemahaman yang diperoleh dari sosialisasi menjadi pemahaman pribadi/individual, dan tidak ditindak lanjuti dengan tindak diseminasi / sosialisasi di lembaga masing-masing, atau rencana tindakan lainnya.

Pada tingkat lokalatih, pembagian peserta ke dalam diskusi-diskusi kelompok menjadikan yang bersangkutan mampu membuka peluang untuk ide-ide baru. Beberapa dinas kehutanan kabupaten di Sulawesi merencanakan untuk mengundang narasumber dari Jakarta untuk menggali peluang program





kehutanan di wilayahnya.

Pada loklatih di Sumatra Utara, peserta diberikan porsi kerja mandiri di samping kerja kelompok. Ini terbukti cukup efektif di dalam mencuatkan refleksi pembelajaran. Para peserta di Sumatra utara keluar dengan matriks rencana tindak lanjut, disertai dengan komitmen *sharing* pembiayaan yang diperlukan. Pada saat tulisan ini disusun, beberapa tindak lanjut yang telah direncanakan sedang diimplementasikan, yang mengindikasikan bahwa mereka cukup serius dalam menarik pembelajaran dari loklatih yang diberikan.

5. Pembelajaran umum

- Pada program sosialisasi SVLK/SVSK, ragam peserta cukup besar, dan ini mengakibatkan tingkat pembelajaran di antara peserta juga terbatas. Secara kasar dapat diduga tingkat penyerapan informasi dan pengetahuan seputar konteks dan materi antara 10 sampai dengan 60 persen.
- Pada sosialisasi yang bersifat konsultasi publik di dalam proses penyiapan SVLK/SVSK, yang dilakukan secara serial, kehadiran peserta yang berbeda selalu mengakibatkan proses sosialisasi diulang dari awal sebelum para peserta mampu merefleksikan materi yang diperlukan untuk penyempurnaan sistem tersebut.
- Tidak ada rancangan pemilihan peserta sesuai dengan tujuan sosialisasi, yang mengakibatkan banyak kehilangan dalam rantai *transfer of information* sekembalinya peserta ke lembaga masing-masing.
- Kurikulum dan fasilitator sosialisasi belum dirancang mengikuti kerangka kurikulum tertentu, yang mengakibatkan koherensi dan harmonisasi kurikulum dan penyampaiannya tidak sepenuhnya mencapai tingkat pembelajaran yang semestinya.
- Target minimal sosialisasi pada umumnya tercapai, yakni penerimaan informasi awal mengenai konteks sertifikasi, verifikasi hutan dan posisi monitoring, tetapi nampaknya akan berhenti sebagai pemahaman individual, bukan pemahaman organisasional di lembaga tempat para peserta bekerja atau melakukan kegiatan.
- Target loklatih untuk penguasaan sistem sertifikasi hutan dan lebih spesifik SVLK/SVSK, serta untuk peserta dari LSM dalam kerangka peningkatan kapasitas sebagai pemantau independen berkompeten belum tercapai.
- Ada kesepakatan di beberapa daerah untuk terus menindaklanjuti dengan proses pengembangan kapasitas berikutnya terutama dalam peningkatan skill dan sikap sebagai pemantau.
- Ada kebutuhan untuk merumuskan standar kompetensi pemantau independen pelaksanaan PHL.





6. Rekomendasi untuk peningkatan kapasitas stakeholder lokal

- a. Untuk kepentingan diseminasi, maka tujuan sosialisasi, pemilihan peserta, kurikulum, dan penyelenggaraannya menjadi penting.
 - Sosialisasi dapat dimengerti sebagai proses pembelajaran mengenai sistem, teknologi/artefak atau budaya “lain” dan bagaimana dapat bekerja/hidup dengan itu. Bagi individu, proses pembelajaran tersebut mengantarkan pada ketrampilan dan sikap untuk menyesuaikan diri. Bagi masyarakat atau lembaga, hasil pembelajaran yang diperoleh dari program sosialisasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kinerja masyarakat atau lembaga yang bersangkutan.
 - Tujuan sosialisasi hendaknya diarahkan pada tipe *secondary socialization*, yakni proses pembelajaran yang menghasilkan pemahaman mengenai apa yang kemudian sebaiknya dilakukan oleh individu dan kemudian lembaga tempat individu yang bersangkutan melaksanakan kegiatannya, setelah menjalani program sosialisasi.
 - Idealnya peserta dipilih berbasis kombinasi dari dua karakter sebagai berikut:
 - Peserta dipilih dari individu yang secara administrasi-birokrasi menempati jabatan yang memungkinkan yang bersangkutan menyebar-luaskan informasi dan pengetahuan yang diperoleh selama lokalatih
 - Peserta dipilih dari individu yang mempunyai kapasitas kepemimpinan, yang mampu mencari terobosan individual untuk penyebar-luasan informasi dan pengetahuan yang diperoleh selama lokalatih kepada konstituen potensialnya.
 - Sosialisasi/Diseminasi maupun lokalatih sebaiknya diawali dengan pemetaan peserta, yang dapat ditempuh melalui pengenalan singkat mengenai identitas diri dan lembaga, misi lembaga dan pengalaman di antara peserta, serta harapan peserta menyangkut sosialisasi atau lokalatih mengenai SVLK/SVSK.
 - Pendekatan kurikulum sosialisasi hendaknya disesuaikan dengan mayoritas “warna” peserta, yang menghasilkan sosialisasi berbasis “*fixed*” *information*, *sequential* (pemberian materi tahap demi tahap), dan perpaduan antara penyampaian formal maupun komunikasi informal.
 - Baik pada sosialisasi maupun lokalatih perlu dimulai dengan sosialisasi, diskusi pada tataran kontekstual, belum langsung masuk pada materi teknis.
 - Pada akhir sosialisasi hendaknya dapat diberikan kuis untuk menangkap hal-hal berikut:
 - refleksi pembelajaran selama mengikuti sosialisasi
 - refleksi rencana tindak lanjut individual setelah mengikuti sosialisasi





- Peran masyarakat madani/*civil society* di dalam implementasi SVLK/SVSK sangat penting. Oleh karenanya, kelompok LSM dihimbau untuk menindak-lanjuti sosialisasi dengan diskusi periodik, shared learning, pertukaran informasi, dan advokasi untuk mengurangi tekanan dan kendala birokrasi. CFs dapat diminta bantuan untuk melakukan fasilitasi tindak lanjut tersebut.
- b. Untuk kepentingan lokalatih, hal-hal yang menyangkut kurikulum dan penyelenggaraan dapat disempurnakan dengan memperhatikan rekomendasi berikut ini:
- Kurikulum hendaknya dirancang mengikuti kerangka kurikulum dan pendekatan pengembangan kurikulum. Kerangka kurikulum diturunkan dari misi dan tujuan pengembangan kapasitas pada kerangka nasional, sedangkan pengembangan kurikulum dibangun atas dasar empat landasan sebagai berikut:
 - Tujuan lokalatih
 - Pemetaan dan konstruksi materi lokalatih seauai dengan karakter peserta, untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut
 - Penataan materi dan agenda lokalatih agar pembelajaran dapat berjalan maksimal
 - Perancangan refleksi hasil lokalatih.
 - Lokalatih pertama hendaknya mengikuti PCNA (*problem centered need assessment*) karena mayoritas peserta selalu mempunyai bekal pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi. Materi standard dilengkapi dengan studi kasus akan menjadi efektif. Jika ada lokalatih lanjutan, maka kurikulum dapat dibangun berbasis CBNA (*competence based need assessment*).
 - PCNA mengarahkan kurikulum untuk pertama kali menggarap konteks dan posisi SVLK/SVSK di dalam peningkatan kualitas tata-keperintahan di bidang kehutanan.
 - Porsi kerja mandiri hendaknya lebih teratur sesuai dengan kebutuhan pendekatan pelatihan andragogi.
 - Dengan terbatasnya waktu, mungkin lebih baik dilakukan pengetatan agenda pelatihan.



